

Ketimpangan Akses Beasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Studi Mahasiswa

Difa Puspa Dalla ^{a,1*}, Hipolitus Kristoforus Kewuel ^{a,2}

^a Universitas Brawijaya, Indonesia

¹ difapuspa.dl@student.ub.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Juli 2023;

Revised: 28 Juli 2023;

Accepted: 2 Agustus 2023.

Kata-kata kunci:

Akses Beasiswa;

Biaya Pendidikan;

Ekonomi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketimpangan akses beasiswa dan dampaknya pada keberlangsungan pendidikan mahasiswa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif terhadap data mahasiswa yang menerima beasiswa, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan akses beasiswa telah menyebabkan; (1) akses beasiswa hanya mungkin bagi mahasiswa dengan kemampuan akademik tinggi IPK 3.00 ke atas, padahal justru beasiswa itu harus bisa diakses oleh mahasiswa yang kapasitas akademiknya rendah sebagai motivasi belajar baginya. (2) Mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik rendah dan karenanya tidak bisa mengakses beasiswa cenderung memanfaatkan kesempatan magang kuliah sebagai tempat kerja dan karenanya menjadi alasan untuk tidak menyelesaikan kuliah dan demi menopang ekonomi orangtuanya. (3) Proses seleksi beasiswa cenderung digeneralisir dari tingkat pekerjaan orangtua. Orangtua PNS tidak mendapat kesempatan untuk menakses beasiswa karena dianggap secara pendapatan memadai untuk biaya kuliah dan biaya hidup keluarga. Padahal, dalam kenyataannya, banyak mahasiswa dari keluarga PNS, pendapatan orangtuanya tidak cukup memadai untuk membiayai kuliah dan sekolah beberapa anak serta biaya hidup rumah tangga. Atas alasan ini, banyak mahasiswa memiliki putus kuliah karena beban tanggungan orangtua yang tidak memadai.

ABSTRACT

Disparities in Scholarship Access and Their Impact on Students' Academic Continuity. This study aims to analyze the inequality of scholarship access and its impact on students' educational sustainability. Utilizing a qualitative approach and descriptive analysis of data from scholarship recipients, this research reveals that the inequality of scholarship access has led to the following outcomes: (1) Scholarships are only accessible to students with high academic achievement, with a GPA of 3.00 or above, whereas scholarships should ideally be available to students with lower academic capacities to motivate their learning. (2) Students with lower academic capabilities, unable to access scholarships, tend to engage in part-time work while studying, leading to dropping out of college to support their family's economic needs. (3) The scholarship selection process is often generalized based on parents' occupations. Civil servant parents are often denied access to scholarships due to the perception that their income is sufficient to cover tuition fees and family expenses. However, in reality, many students from civil servant families face inadequate financial support for their education and their household's living expenses. As a result, numerous students drop out of college due to the burden of insufficient parental support.

Keywords:

Scholarship Access;

Education Costs;

Economics.

Copyright © 2023 (Difa Puspa Dalla & Hipolitus Kristoforus Kewuel). All Right Reserved

How to Cite : Dalla, D. P., & Kewuel, H. K. (2023). Ketimpangan Akses Beasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Keberlangsungan Studi Mahasiswa. *Educare : Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 52–59. <https://doi.org/10.56393/educare.v3i2.1702>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Menurut (Saa, 2018) agar proses pendidikan menghasilkan sumber daya yang berkualitas harus dikelola dengan manajemen yang baik. Berbagai penelitian mengenai biaya pendidikan telah banyak diteliti. Salah satunya penelitian Jubba (2018) yang berjudul “Politik Pendidikan Indonesia: Ketimpangan Dan Tuntutan Pemenuhan Kualitas Sumber Daya”. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari total APBN. Ini merupakan sebuah langkah maju dan strategis dalam rangka menggenjot berbagai kendala finansial yang sering menjadi kendala sejauh ini. Meskipun demikian, kebijakan anggaran pendidikan sering tidak sejalan dengan prakteknya. Misalnya, masih banyak kasus yang mengakibatkan warga negara tidak melanjutkan sekolah, putus sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan karena alasan finansial. Untuk keluar dari berbagai hal tersebut pemerintah memang telah melakukan berbagai program untuk memudahkan masyarakat mengakses sekolah dengan dana yang minim, seperti melalui sistem zonasi, dana BOS, dan lain-lain. Meskipun demikian, masih saja ditemukan berbagai persoalan yang sulit diatasi dengan tuntas (Handayani & Kewuel, 2023).

Untuk menjalankan proses pendidikan, dukungan finansial yang memadai diperlukan agar operasionalnya dapat berjalan dengan lancar. Pembiayaan pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM, yang meliputi program sekolah, pengadaan fasilitas, pembayaran gaji guru dan pegawai, serta pemenuhan visi dan misi sekolah untuk menciptakan SDM berkualitas (Sagala, 2007). Pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Fungsi utamanya adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Setiap individu membutuhkan pendidikan sebagai kebutuhan dasar, karena melalui pendidikan, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud (Kewuel, 2014). Selain itu, pendidikan juga memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bukan hanya berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat. Pendidikan memungkinkan sumber daya manusia untuk lebih adaptif dan siap menghadapi tantangan dan proses pembangunan suatu negara dengan lebih baik (Sudarsana, 2015). Salah satu masalah yang muncul dalam konteks ini adalah biaya pendidikan tinggi yang tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula pengeluaran biaya untuk pendidikan (Todaro & Smith, 2011). Adanya biaya pendidikan yang tidak murah berakibat pada banyaknya anak yang berasal dari kelas ekonomi bawah sulit mendapatkan akses pendidikan yang lebih bermutu (Sulfasyah, 2016). Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi (Aliyyah, 2020).

Dalam upaya mengatasi masalah biaya pendidikan tinggi, pemerintah telah menciptakan program beasiswa. Beasiswa menjadi instrumen penting dalam menciptakan kesempatan pendidikan yang adil dan merata bagi semua individu, termasuk mahasiswa. Beasiswa memainkan peran kunci dalam memberikan akses ke pendidikan berkualitas, meringankan beban finansial, dan mendorong keberlanjutan studi mahasiswa. Namun, isu ketimpangan akses beasiswa masih menjadi perhatian yang utama di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab VI, Pasal 46 ayat 2, mengatur bahwa badan hukum pendidikan harus memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan kepada warga negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau kepada siswa yang memiliki potensi tinggi. Beasiswa merupakan bantuan yang diberikan oleh instansi, baik pemerintah maupun swasta, kepada siswa yang memiliki potensi akademik dan non-akademik yang baik tetapi kurang mampu secara ekonomi. Beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa sarjana dan siswa yang saat ini terdaftar di sekolah atau perguruan tinggi. Jenis beasiswa yang tersedia untuk

mahasiswa meliputi Beasiswa Sampoerna Foundation, Beasiswa Peningkatan Potensi Akademik (PPA), Beasiswa Bank Indonesia, dan masih banyak lagi, termasuk Beasiswa Bidikmisi.

Dalam penelitian ini, akan mengacu pada teori pembebasan yang terinspirasi oleh pandangan pendidikan Paulo Freire. Freire menyajikan pandangan yang mencakup upaya pembebasan dari berbagai masalah, tidak hanya terbatas pada isu pendidikan, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi, politik, hukum, dan budaya sehari-hari. Integrasi realitas sosial ke dalam pendidikan menjadi salah satu langkah untuk membebaskan diri dari permasalahan sosial yang ada. Bagi Freire, tujuan utama pendidikan adalah membuka wawasan peserta didik untuk menyadari keterjepitan mereka dalam realitas ini dan kemudian bertindak untuk mencapai perubahan sosial. Proses menyadarkan peserta didik tentang kondisi yang membelenggu mereka disebut sebagai "konsientasi," yaitu pemahaman akan situasi nyata yang dihadapi oleh peserta didik. Freire berpendapat bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam proses pembebasan manusia dan merupakan nilai yang sangat penting dalam mencapai hal tersebut (Syaikhudin, 2012).

Selain faktor individu, akses beasiswa juga dipengaruhi oleh faktor politik dan kebijakan yang ada di suatu negara. Kebijakan pendidikan yang disusun oleh pemerintah, alokasi anggaran pendidikan, dan kebijakan khusus terkait beasiswa memiliki dampak langsung terhadap kesetaraan akses beasiswa di masyarakat. Kebijakan pendidikan yang inklusif dan adil dapat menciptakan lingkungan yang merata bagi semua individu untuk mengakses beasiswa. Upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk beasiswa serta memberikan kesempatan yang setara kepada semua kelompok masyarakat akan berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan akses beasiswa. Selain itu, anggaran pendidikan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam menjaga kesetaraan akses beasiswa. Ketika anggaran pendidikan yang cukup tidak tersedia, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa akan terbatas, yang berpotensi memperburuk ketimpangan akses beasiswa di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan memperhatikan pengaruh anggaran pendidikan dan kebijakan alokasi dana terhadap kesetaraan akses beasiswa. Selanjutnya, kebijakan beasiswa yang jelas dan transparan juga memainkan peran penting dalam menjamin kesetaraan akses. Kriteria eligibility yang adil, proses aplikasi yang terbuka, serta penyediaan informasi yang mudah diakses bagi semua individu akan membantu mengurangi kesenjangan akses beasiswa di antara mahasiswa. Dukungan yang diberikan kepada mahasiswa selama masa studi juga berdampak pada keberlanjutan studi mereka.

Metode

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Metode kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengaruh pemberian beasiswa terhadap keberlangsungan pendidikan para peserta didik. Peneliti akan mencari informan yang terdiri dari dua kelompok: mahasiswa yang menerima beasiswa dan mahasiswa yang tidak menerima beasiswa. Dengan melibatkan kedua kelompok ini, peneliti dapat membandingkan pengalaman dan persepsi mereka terkait dengan pengaruh pemberian beasiswa terhadap pendidikan mereka. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara akan berkaitan langsung dengan topik penelitian, seperti pengalaman menerima beasiswa, perubahan dalam akses dan kualitas pendidikan yang dirasakan, dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan, serta persepsi mereka tentang pentingnya pemberian beasiswa dalam memastikan keberlangsungan pendidikan mereka. Dalam memaparkan situasi dan kondisi masyarakat terkait fenomena yang akan diteliti, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kasus atau studi kasus. Pendekatan deskriptif kualitatif akan digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang pengaruh pemberian beasiswa terhadap keberlangsungan pendidikan para peserta didik. Melalui penelitian ini, peneliti akan menggambarkan konteks dan faktor-faktor yang memengaruhi fenomena yang diteliti dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang holistik tentang pengaruh pemberian beasiswa dalam masyarakat tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Berbagai skema telah dilakukan negara dalam mewujudkan penyerapan anggaran ini. pada level sekolah (SD, SMP, SMA dan sederajat) telah diberikan subsidi biaya pendidikan sehingga pembiayaan tidak dibebankan kepada peserta didik (Jubba H., 2018). Di tingkat perguruan tinggi, berbagai mekanisme beasiswa telah disiapkan dan telah berjalan hingga saat ini dengan berbagai kendalanya masing-masing. Alokasi anggaran yang besar tidak serta-merta melahirkan kebijakan yang memihak bagi seluruh anak bangsa dalam menikmati pendidikan. Selain jarak dan akses informasi yang kurang, biaya pendidikan yang tinggi juga semakin menambah runyam warga miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Biaya pendidikan yang tinggi minat melanjutkan pendidikan semakin rendah. Hal ini pun kemudian berdampak pada tingkat daya saing SDM yang juga rendah.

Menurut laporan dari UNDP tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat ke-108 dari 187 negara berdasarkan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura yang berada di peringkat 18, Malaysia di peringkat 64, Thailand di peringkat 103, dan Filipina di peringkat 114 (Pramudya, 2014). Kemudian juga data tentang mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi di ASEAN, ASIA, dan apalagi di tingkat DUNIA menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya (Kewuel, 2017). Oleh karena itu, negara harus mengaktualisasikan kebijakan pendidikan dengan tetap mengedepankan asas pemerataan bukan kesamarataan sehingga dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan akan dapat dinikmati oleh siapa saja tanpa ada perbedaan.

Pada tulisan ini peneliti berusaha mengeksplorasi persoalan ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia. Pemenuhan tuntutan kualitas sumber daya manusia dengan salah satu jalan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan formal. Pendidikan formal selalu digunakan sebagai salah satu investasi subjek didik untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Namun banyak lulusan pendidikan formal masih belum sukses memanfaatkan pendidikannya untuk menempuh pekerjaan yang baik dan layak.

Pada pembahasan ini, peneliti menganalisis hasil wawancara dan data yang diperoleh dari mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya yang menerima beasiswa dari program pemerintah. Program beasiswa pemerintah memiliki berbagai jenis, seperti Beasiswa KIP, Bidikmisi, dan prestasi, yang bertujuan untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan mereka. Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah juga memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk meraih prestasi. Seperti yang dikemukakan oleh (Jayen, 2018), beasiswa memiliki pengaruh dominan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Pemberian beasiswa dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa dan meningkatkan motivasi belajar mereka.

Mayoritas beasiswa dari pemerintah ditujukan untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Sebagai contoh, salah satu narasumber dalam penelitian ini yakni yang menerima biaya pendidikan dari pemerintah karena keluarganya kurang mampu. Informan menceritakan pengalamannya dalam mendapatkan beasiswa dari semester 1 untuk membantu meringankan beban orangtuanya. Menurutnya, selain beasiswa dari pemerintah, terdapat juga beberapa program beasiswa dari swasta seperti Beasiswa Basis, PMKM, dan beberapa beasiswa swasta lainnya. Dari ketiga program tersebut, informan diterima sebagai penerima Beasiswa PMKM, yaitu program pertukaran pelajar yang berlangsung selama satu semester. Informan juga mengikuti program beasiswa yang dibuat oleh pemerintah DKI Jakarta, yaitu KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul), yang merupakan kelanjutan dari program pemerintah KJP (Kartu Jakarta Pintar).

Informan sudah mendapatkan beasiswa KJP sejak SMP-SMA, kemudian saat lulus SMA, informan mendapatkan beasiswa KJMU. Namun, karena informan sempat berhenti kuliah selama setahun karena masalah pribadi, informan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa KJMU. Informan harus mengurus pendaftaran ulang yang memakan waktu sekitar 1 tahun, sebelum akhirnya

berhasil mendapatkan kembali program beasiswa tersebut. Jumlah beasiswa yang diterima informan dari pemerintah cukup besar, yaitu sekitar 9 juta per semester. Dalam setahun, informan menerima biaya pendidikan dan biaya hidup sebesar 18 juta selama menjalani program pendidikan di kampusnya. Dana tersebut membantu informan dalam menutupi kekurangannya selama menjalani pendidikan. Karena mahasiswa sering melakukan penelitian, mengerjakan tugas, dan mengikuti kegiatan akademik di luar kampus, mereka membutuhkan biaya tambahan. Oleh karena itu, program beasiswa dari pemerintah sangat membantu informan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Informan merasa terbantu dengan adanya program beasiswa dari pemerintah yang memberikan akses bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Persyaratan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan beasiswa tersebut tidak terlalu memberatkan. Para penerima beasiswa harus mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak kurang dari 3,00. Oleh karena itu, mahasiswa penerima beasiswa, termasuk informan, berusaha mengoptimalkan dan meningkatkan prestasi akademik mereka agar tetap memenuhi syarat untuk menerima beasiswa tersebut. Selain itu, para penerima beasiswa juga diminta untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Pengabdian Masyarakat (PM). Kontribusi tersebut dapat berupa pembagian donasi, partisipasi dalam kegiatan gotong royong saat terjadi bencana banjir yang diinisiasi oleh pemerintah atau mengembangkan program sosial sesuai dengan konteks mereka. Para penerima beasiswa juga diwajibkan mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan dan memberikan laporan untuk membuktikan bahwa mereka telah memberikan kontribusi kepada masyarakat DKI Jakarta.

Keuntungan yang didapatkan oleh para penerima beasiswa dari pemerintah adalah kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan dan beasiswa lainnya. Mereka juga dapat mengikuti workshop dan wawancara kerja khusus yang disediakan bagi para penerima beasiswa. Program tersebut disebut Naramuda yang membantu para penerima beasiswa mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan mereka dan memberikan dukungan agar mereka dapat diterima dalam lowongan pekerjaan tersebut. Kemudian juga pemberian beasiswa memiliki kontribusi yang cukup untuk meningkatkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa (Hapsari, 2017). Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa diharapkan mempunyai prestasi yang baik yang dapat dilihat dari capaian IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) di atas 3,0 (Noviandini, 2020).

Oleh karena itu, para penerima beasiswa dengan baik memanfaatkan program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah untuk keperluan pendidikan mereka. Program ini sangat membantu dalam meringankan beban finansial keluarga mereka yang kurang mampu. Beasiswa yang diterima juga dapat meningkatkan prestasi mahasiswa dan memotivasi mereka untuk mempertahankan program beasiswa dari pemerintah. Pendidikan formal sering dianggap sebagai investasi untuk mencapai taraf hidup sejahtera, namun masih banyak lulusan pendidikan formal yang belum berhasil memanfaatkan pendidikan mereka dalam dunia kerja. Output dari pembelajaran ini salah satunya adalah menghasilkan peserta didik yang siap kerja (Suti, 2011).

Salah satu subjek didik yang mengalami hal ini adalah informan kedua, yaitu mantan siswa Universitas Brawijaya yang memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah karena sudah mendapatkan pekerjaan layak melalui proses magang. Kehidupan kuliah informan tidak berjalan baik karena masalah ekonomi yang menyulitkannya dalam mengikuti berbagai proyek perkuliahan. Selain itu, ia menghadapi kesulitan dalam memenuhi kriteria penerimaan beasiswa untuk kategori tidak mampu (KIP) karena ayahnya adalah pegawai negeri. Ayah informan sebagai guru PNS memiliki tanggungan biaya pendidikan lima anak, termasuk informan sendiri dan adiknya yang berkuliah. Informan mencoba mendaftar beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, namun terus ditolak. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk berhenti kuliah dan bekerja di instansi tempat ia magang untuk membantu perekonomian keluarga yang tidak stabil.

Pandangan pendidikan humanisme Freire (1996), yang juga terbentuk dari realitas ketimpangan pendidikan di daerahnya, memberikan pemahaman bahwa dalam struktur masyarakat terdapat

kesenangan yang dinikmati oleh sebagian orang, sementara sebagian lainnya harus menderita dan merasakan penindasan. Pemikiran humanisme Freire menekankan pada "pembebasan" dari ketertindasan dan keterbelengguan serta kebebasan manusia yang terganggu oleh berbagai hal (Fadli, 2020).

Namun, dalam kasus informan, tuntutan pendidikan yang diberikan kepadanya membuat biaya pendidikan menjadi beban yang sulit ditanggung oleh orangtuanya, sehingga ia tidak dapat melanjutkan studinya. Pendidikan yang bersifat humanis ini belum sepenuhnya merata dan masih dirasakan ketimpangannya, terutama oleh kalangan yang memiliki label PNS seperti orangtua informan. Hal ini membuat informan merasa terbelenggu dan tertindas oleh kondisi ekonomi yang sulit dihadapinya. Fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia memang sudah berdiri kokoh sebagai upaya pemenuhan mutu dan akreditasi sekolah. Namun, tidak hanya fasilitas yang menjadi kendala, tetapi juga keberhasilan dalam pemenuhan kurikulum yang diterapkan dan lulusan yang dihasilkan. Banyak mahasiswa yang tidak dapat mewujudkan impian mereka karena berbagai kendala, terutama masalah ekonomi. Hal ini menghambat pemaksimalan dalam kualitas sumber daya manusia karena peserta didik kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), memenuhi kebutuhan praktikum, penelitian, serta biaya sewa kos dan makan sehari-hari yang sulit bagi keluarga informan.

Permasalahan ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia tercermin melalui pengalaman informan dan tantangan yang dihadapinya dalam memenuhi tuntutan pendidikan. Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan utama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Pendekatan pendidikan humanis, seperti yang dipahami dari pemikiran Freire dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang lebih luas terhadap fenomena ini dan masih diperlukan upaya yang lebih serius untuk mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua kalangan masyarakat.

Kebijakan pendidikan di Indonesia sebenarnya sudah dikelola dan dijalankan dengan baik oleh pemerintah, namun perlu adanya dukungan komitmen untuk menerapkan asas pemerataan dalam pengelolaan pendidikan. Standar yang digunakan untuk mahasiswa di perguruan tinggi terkemuka meliputi tugas perkuliahan, laptop, praktikum, buku, dan biaya tak terduga lainnya. Hal ini menyulitkan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Meskipun begitu, kebijakan anggaran pendidikan sering tidak sejalan dengan prakteknya. Masih banyak kasus di mana warga negara tidak dapat melanjutkan sekolah, putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan karena alasan finansial. Anggaran 20% dari dana APBN harus digunakan dengan tepat dan dapat dinikmati oleh seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sarana pendidikan harus didukung oleh ketersediaan akses yang lebih terbuka.

Namun, dana yang besar tersebut tidak didistribusikan secara merata. Perguruan tinggi negeri, misalnya, menerima subsidi dari pemerintah. Namun, syarat dan standar yang ketat dalam penerimaan beasiswa negeri dan swasta menjadi kendala bagi mahasiswa. Hal ini hanya dapat dinikmati oleh calon penerima beasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik dan keadaan ekonomi orangtua yang memenuhi syarat. Sementara itu, informan yang ayahnya bekerja sebagai PNS dengan gaji standar, sering kali tidak memenuhi syarat dan tidak mendapatkan beasiswa.

Pengaruh globalisasi yang didorong oleh pasar telah menyebabkan perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak lagi hanya dipandang sebagai upaya untuk mencerdaskan bangsa atau memperjuangkan kemerdekaan manusia, tetapi juga mulai dijadikan komoditas (Effendi, 2009). Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan lulusan perguruan tinggi, yang kemudian memunculkan pengangguran sarjana. Hal ini menunjukkan lemahnya manajemen pengelolaan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, kesempatan informan untuk mendapatkan pekerjaan di instansi tempat ia magang merupakan kebetulan yang baik baginya karena dapat mengurangi beban ekonomi ayahnya yang juga menanggung kebutuhan 4 anak lainnya dan kebutuhan rumah tangga. Harapan informan dan masyarakat lainnya dalam hal pendidikan adalah adanya pemerataan dalam pembagian beasiswa. Survei menunjukkan bahwa tidak semua pekerjaan

formal menjamin kehidupan yang sejahtera karena banyak tanggungan yang harus ditanggung oleh keluarga informan.

Paulo Freire menekankan pentingnya kesadaran kritis dalam pendidikan di mana peserta didik diundang untuk merenungkan dan mengkritisi realitas mereka. Dalam konteks akses beasiswa, mahasiswa yang menghadapi kendala ekonomi dan kesulitan untuk memenuhi persyaratan beasiswa dapat dibantu dengan meningkatkan kesadaran tentang kondisi sosial mereka. Penyuluhan tentang akses beasiswa dan memahami pentingnya pendidikan sebagai sarana pembebasan dapat memberikan kesadaran kepada mahasiswa untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya. Teori pembebasan Freire menitikberatkan pada upaya pembebasan dari berbagai masalah sosial, termasuk masalah akses beasiswa. Mahasiswa yang menghadapi ketidakadilan dalam akses pendidikan karena masalah ekonomi harus didorong untuk beraksi dan melakukan perubahan sosial. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil untuk memastikan akses yang setara bagi semua mahasiswa.

Freire percaya bahwa pendidikan harus memberdayakan siswa sebagai agen perubahan sosial. Dalam konteks akses beasiswa, mahasiswa yang menghadapi kendala ekonomi harus didorong untuk mencari solusi dan mencari peluang untuk mengatasi tantangan tersebut. Mereka harus merasa terdorong dan didukung untuk mencari pekerjaan magang atau beasiswa lainnya untuk membantu mengurangi beban keuangan keluarga. Freire berpendapat bahwa pendidikan harus berfungsi sebagai proses pemerdekaan atau humanisasi dan bukan sebagai alat untuk menjinakkan atau mendomestikasi masyarakat seperti yang sering terjadi di negara-negara dunia ketiga seperti Brazil. Di banyak kasus, pendidikan digunakan oleh penguasa untuk melegitimasi dominasi atas masyarakat yang kurang berkuasa. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi tindakan dan refleksi menyeluruh untuk mengubah realitas yang menindas menuju pembebasan (Syaikhudin, 2012).

Dengan mengaitkan ketimpangan akses beasiswa dan kendala ekonomi dengan teori pembebasan dari Paulo Freire, kita dapat melihat bahwa teori ini memberikan landasan untuk memahami pentingnya kesadaran, partisipasi, dan pembebasan dari ketidakadilan sosial dalam upaya mencapai akses pendidikan yang setara bagi semua. Dalam implementasinya, teori pembebasan dapat membantu mengatasi masalah akses beasiswa dan mendukung mahasiswa untuk mencapai potensi mereka yang tertinggi melalui pendidikan.

Simpulan

Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah telah berhasil meningkatkan semangat dan prestasi mahasiswa. Data menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masalah akses terhadap beasiswa terutama terkait dengan persyaratan yang ketat dan kendala ekonomi yang dihadapi oleh mahasiswa dari latar belakang keluarga pegawai negeri sipil (PNS) atau orangtua dengan penghasilan bervariasi. Kebijakan pendidikan harus mengutamakan prinsip keadilan dan mendukung akses yang lebih terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Namun, manajemen pendidikan di Indonesia masih perlu diperkuat untuk mencapai pembagian beasiswa yang lebih adil dan merata. Beberapa mahasiswa mencari pekerjaan magang sebagai jalan keluar untuk membantu mengurangi beban keuangan keluarga mereka. Harapan bagi pembagian beasiswa yang lebih adil mencuat berdasarkan hasil survei karena tidak semua orang yang bekerja secara formal dapat hidup sejahtera, mengingat banyaknya kebutuhan yang harus ditanggung selain satu anggota keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan menyeluruh dalam penentuan kriteria penerimaan beasiswa agar tidak hanya berfokus pada aspek akademik semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor ekonomi dan kondisi keluarga mahasiswa. Upaya untuk mengurangi ketimpangan akses beasiswa harus berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan perhatian kepada kelompok-kelompok yang kurang mampu secara finansial. Dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa, diharapkan

proses pemaksimalan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan lebih baik dan berdampak positif pada pembangunan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Sebuah perubahan dalam manajemen dan pelaksanaan kebijakan pendidikan diperlukan untuk mencapai tujuan ini sehingga setiap warga negara dapat memiliki akses yang setara dan adil dalam meraih pendidikan yang berkualitas.

Referensi

- Achyanadia, S. (2016). Peran Teknologi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sdm. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5(1).
- Aliyyah, R. R., Ulfah, S. W., Herawati, E. S. B., Rachmadtullah, R., & Asmara, A. S. (2020). Bidikmisi: Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3(1), 37-54.
- Fadli, R. V. (2020). Tinjauan Filsafat Humanisme: Studi Pemikiran Paulo Freire Dalam Pendidikan. *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(2), 96-103.
- Freire, Paul, 1996. *Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage*, Rowman & Littlefield Publisher, INC.
- Handayani, K. D., & Kewuel, H. K. (2023). Potret Beban Pendidikan Siswa dan Orangtua dalam Menghadapi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. *Pedagogi : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 44–54. <https://doi.org/10.56393/pedagogi.v3i2.1683>
- Hapsari, D.T. 2017. “Pengaruh Beasiswa PPA dan Kebiasaan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa FKIP UNS Penerima Beasiswa PPA Periode Januari-Juni 2017. *BISE : Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi*.
- Jubba, H., & Pabbajah, M. (2018). Politik pendidikan Indonesia: Ketimpangan dan tuntutan pemenuhan kualitas sumber daya. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 49-60.
- Kewuel, Hipolitus Kristoforus (2014). Sistem Pendidikan Nasional dan Kurikulum Dalam Perspektif Filsafat Antropologi, *Erudio (Journal of Educational Innovation)*, Volume 2, Nomor 2
- Kewuel, H. K. (2017). Analisis Antropologi Pendidikan Tentang Penguatan Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi Dalam Tata Pendidikan Global. *Erudio Journal of Educational Innovation*, 3(2), 55-66.
- Ningrum, E. (2016). Pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan. *Jurnal Geografi Gea*, 9(1).
- Noviandini, F. (2020). Pengaruh Beasiswa Bidikmisi Terhadap Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Bidikmisi Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan 2015–2017 Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 9(2), 152-160.
- Pramudyo, A. (2014). Mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi asean tahun 2015. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(2).
- Rahma, A. (2017). Pendidikan Humanis Paulo Freire Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Doctoral dissertation, IAIN Raden Intan Lampung)
- Rusli, Ariwibowo. 2017. “Analisis Penggunaan Dana Beasiswa Berprestasi Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNTAN”. Pontianak : Universitas Tanjungpura.
- Saâ, H. (2018). Manajemen mutu pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia. *Bidayatuna Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2), 183-204.
- Sagala, Syaiful. 2007. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Pembukaan Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah Dalam Sistem Otonomi Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsana, I. K. (2015). Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1), 1-14.
- Sulfasyah, S., & Arifin, J. (2016). Komersialisasi pendidikan. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(2).
- Suti, M. (2011). Strategi peningkatan mutu di era otonomi pendidikan. *Jurnal Medtek*, 3(2), 1-6.
- Syaikhudin, A. (2012). Konsep pemikiran pendidikan menurut paulo freire dan ki hajar dewantoro. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 10(1), 79-92.
- Todaro, M. & Smith, S.C. 2011. *Pembangunan Ekonomi: Edisi kesebelas Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.